



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. 3 dan 13 serta Blok E Lt. 3  
Telp. (021) 3823355 Fax. (021) 3848850 dan Fax. (021) 3823253  
J A K A R T A 10110

---

**SIARAN PERS**  
**NOMOR: 1090/SP-HMS/03/2020**

**2 Maret 2020**

**LANGKAH PEMPROV DKI TANGANI COVID-19, KIRIM PESAN PUBLIK HINGGA  
PENJEMPUTAN PASIEN**

Balaikota Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil sejumlah langkah cepat dan responsif berdasarkan fakta dan situasi urgen dalam penanganan COVID-19 di Ibu Kota. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai melakukan rapat bersama seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dan BUMD Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Senin (2/3).

Gubernur Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta akan secara rutin mengirimkan pesan publik secara berantai melalui aplikasi WA (WhatsApp) maupun SMS, tentang potensi risiko apabila ditemukan tempat-tempat baru yang perlu dihindari dan/atau informasi baru yang perlu diketahui oleh masyarakat. Gubernur Anies mengimbau, agar masyarakat tidak bepergian ke lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkau virus tersebut.

"Hindari tempat itu. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk kegiatan perkumpulan orang dalam jumlah yang besar. Dan yang sudah terlanjur keluar izinnya, akan direview kembali," ungkap Gubernur Anies.

Gubernur Anies pun menjelaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi masyarakat yang merasakan kondisi gejala COVID-19 ataupun melihat seseorang yang memiliki gejala COVID-19 dengan langsung menghubungi nomor telepon 112 atau 119. Analisa diagnosa akan dilakukan secara jarak jauh melalui telepon dan konfirmasi gejala akan dilakukan dengan didatangi dan atau penjemputan langsung ke kediaman (tempat) orang tersebut.

"Kami meminta jangan langsung ke fasilitas kesehatan. Mengapa? Bila sampai itu terkonfirmasi, untuk mengurangi potensi penularan. Kami yang akan jemput, akan ditelepon, akan dilakukan diagnosis melalui telepon, lalu akan didatangi, dan lalu dibawa ke fasilitas kesehatan. Kalau datang sendiri, nanti berangkatnya misalnya positif, berangkatnya di perjalanan punya potensi penularan, di ruang tunggu punya potensi

penularan. Jadi, tinggal di tempat Anda berada dan kami yang akan jemput. SOP-nya seperti itu. Dan kita sudah siapkan tenaga yang cukup, fasilitas yang cukup untuk merespon itu semua, tapi semuanya dilakukan telepon dulu (untuk sementara)," tegas Gubernur Anies.

Gubernur Anies juga mengimbau masyarakat untuk tidak ikut panic buying (pembelian secara berlebihan) karena stok kebutuhan Jakarta dalam kondisi cukup. Gubernur Anies berharap belanja eksekutif karena khawatir stok yang berkurang tidak perlu dilakukan lantaran akan mengganggu stabilitas perekonomian.

"Lalu, saya mengimbau juga kepada seluruh masyarakat. Meskipun beramai-ramai belanja hand sanitizer, tapi sesungguhnya pembersihan yang paling baik itu justru menggunakan air dan sabun. Karena itu, cuci tangan dengan air dan sabun, airnya mengalir, itu jauh lebih efektif. Jangan enggan untuk melakukan itu. Hand sanitizer tentu bisa, tapi lebih bersih, lebih baik menggunakan air mengalir dan sabun," pesannya.

Gubernur Anies juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta terbuka atas segala informasi, khususnya ilmu pengetahuan, tentang COVID-19 yang perlu diketahui bersama dan ditanggapi secara cepat. "Apabila ditemukan informasi yang perlu diketahui oleh pemerintah, laporkan. Kami siap untuk merespon dan tim kita akan berjaga 24 jam untuk tanggap COVID-19 ini," pungkasnya.

Langkah Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan usai COVID-19 telah diketahui menginfeksi dua orang warga Depok yang saat ini tengah dirawat di RS Sulianti Saroso, Jakarta Utara.